

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 1 ayat (3) berisi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Hal ini berarti juga bahwa negara Indonesia memberi batasan tingkah laku terhadap warga negaranya dalam sebuah peraturan atau norma. Peraturan atau norma tersebut harus sesuai dengan hukum yang telah berlaku (*ius constitutum*).¹

Pada dasarnya undang-undang merupakan suatu hasil produk politik hukum yang bersifat pasif. Tanpa adanya aktifitas pelaksana undang-undang oleh aparatur negara, undang-undang merupakan sebuah hasil produk politik hukum yang tidak memiliki daya guna hingga aparatur negara yang berwenang mendayagunakan undang-undang tersebut.

Berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan jumlah dan ragam permasalahan yang berbeda menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi aparatur penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana tujuan undang-undang tersebut diciptakan. Dan menjadi sebuah problematika tersendiri apabila suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat menjadi sangat rumit untuk diselesaikan. Salah satunya ialah

¹ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010, hal 57

mengenai permasalahan kejahatan yang dipengaruhi oleh peredaran senjata api di dalam masyarakat. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil dengan melalui proses yang cukup ketat.

Di era yang kian maju seperti sekarang ini, senjata api seperti bukan lagi sekedar alat yang hanya dimiliki kalangan militer dan diperuntukkan hanya untuk membunuh musuh di medan tempur, tetapi benda ini sudah menjadi bagian alat olah raga, alat membela diri, bahkan bagi sebagian kalangan benda ini sudah menjadi bagian alat untuk menikmati gaya hidup mereka melalui hobi berburu.

Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat tentang kepemilikan senjata api bela diri selama ini memang bisa dimaklumi. Sebagian masyarakat menganggap, memiliki senjata api bela diri berizin resmi hanya akan menjadikan si pemilik berlaku arogan dan sok jagoan. Kekhawatiran sejumlah masyarakat bahwa Indonesia akan menjadi negara *cowboy* juga sempat berguirl, karena semakin banyaknya para eksekutif memiliki senjata berizin resmi.

Sebenarnya, kekhawatiran seperti itu tak perlu terjadi jika masyarakat sudah tahu dan memahami dua persoalan pokok. *Pertama*, perolehan surat izin kepemilikan senjata beladiri dari pihak Kepolisian tidaklah semudah yang dibayangkan. POLRI sebagai lembaga yang berwenang telah melakukan seleksi yang ketat, sebelum surat izin kepemilikan senjata diberikan kepada yang berhak. *Kedua*, bila seseorang telah memiliki surat izin tersebut, maka berarti dia sudah terikat oleh etika dan aturan main yang wajib dipatuhinya.

Etika dan aturan main tersebut harus melekat pada si pemiliknya di saat membawa, menggunakan dan menyimpan senjata.

Dari gambaran permasalahan di atas, jelaslah bahwa peran negara dalam mengontrol tingkahlaku warga negaranya secara langsung dapat dilihat sebagai poses Hukum Administrasi Negara. Istilah Hukum Administrasi Negara itu sendiri sering kita dengar dengan istilah *Administratief recht* (Belanda), *Administrative Law* (Inggris), *Droit Administrative* (Prancis), atau *Verwaltungsrecht* (Jerman). Kemudian arti dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri merupakan sebuah proses teknis atau aktivitas penyelenggaraan undang-undang, artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang.²

Secara normatif, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat ketat dalam menarapkan aturan kepemilikan senjata api bagi kalangan sipil. Hal tersebut dapat kita lihat dalam standar administratif perizinan senjata api yang terdapat pada UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, UU No.8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Dan selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, SK Kapolri No. Pol.: Skep/82/II/2004, tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/POLRI, dan yang terakhir Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api

² C.S.T. Kansil, dkk, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hal.4

Standar Militer di Luar Lingkungan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah metode pemberian izin kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil, serta faktor apa saja yang mempengaruhi pembatasan kepemilikan senjata api oleh POLRI dan bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan baik oleh POLRI selaku lembaga pemberi izin serta pihak-pihak sipil tertentu selaku pemegang senjata api berizin. Maka, peneliti dengan ini mengambil judul **“PERIZINAN SENJATA API BAGI MASYARAKAT SIPIL DI SURAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dengan baik dan terarah guna dihindarinya pembiasan konsentrasi penelitian, maka penulis memandang perlu untuk merumuskan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme administrasi perizinan senjata api bagi masyarakat sipil di Surakarta?
2. Bagaimanakah sistem pengawasan senjata api yang telah beredar atas diperolehnya izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil di Kota Surakarta?
3. Hal-hal apakah yang mendorong masyarakat sipil mengajukan izin kepemilikan senjata api?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme administrasi perizinan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan senjata api yang telah beredar atas diperolehnya izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil di Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat sipil mengajukan izin kepemilikan senjata api di Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai peran Polri dalam pelegalan serta penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil di kota Surakarta.
 - b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan suatu pemahaman serta informasi praktis mengenai mekanisme administrasi perizinan senjata api bagi sipil dan penanggulangan penyalahgunaannya di kota Surakarta.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya hampir segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam perundang-undangan yang mengaturnya. Kemudian disebutkan dalam alenia ke empat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Konsep tujuan negara baik khusus maupun umum. Secara Khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan Secara Umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”³

Maka untuk dapat melaksanakan sistem pemerintahan yang dapat berjalan dengan baik tentu harus ditopang dengan sistem kinerja aparatur negara yang disebut sebagai sistem administrasi negara. Dan untuk lebih mengenal apa itu administrasi negara, Ph. Kleintjes dalam buku *Staatsinstellingen van Nederland Indie* mendefinisikan bahwa, Hukum Administrasi Negeran (*Administratief recht*) adalah kaidah hukum mengenai

³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pradigma, 2004, Hal. 169-161

penyelenggaraan (*uitoefening*) tugas masing-masing alat perlengkapan negara. Sedangkan menurut J.H.A. Logemann, mendefinisikan Hukum Administrasi Negara sebagai kaidah-kaidah hukum khusus selain hukum perdata, yang mengatur cara bagaimana organisasi negara ikut serta di dalam pergulatan masyarakat. Dan berbeda dengan Hukum Tata Negara yang mempelajari negara dalam keadaan diam (*staits*), yaitu pada saat negara tidak atau belum melakukan perbuatan hukum. Hukum Administrasi Negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak (dinamis), yaitu pada saat negara melakukan perbuatan hukum.⁴

Izin adalah salah satu bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Pembuat dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Dan tindakan hukum tersebut harus berdasarkan wewenang yang diberikan perundang-undangan. Dalam praktek kewenangan izin itu bersifat *diskresionare power*, dalam arti pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin. Adapun pertimbangan-pertimbangan pemberian izin adalah sebagai berikut:

1. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
2. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.
3. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Aidul Fitriciada Azhari, *Modul kuliah Hukum Tata Negara I*, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.⁵

Dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa senjata api adalah senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol dan sebagainya). Sedangkan dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri diterangkan bahwa senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.⁶ Dan dijabarkan kembali dalam pengertian yang lebih kompleks bahwa senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru / proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.⁷

Dari pengertian tersebut maka terdapat beberapa unsur yang dikatakan senjata api yaitu meliputi:

1. Dengan jenis tertentu seperti adanya laras sebagai alur larinya peluru.
2. Terdapatnya proyektil yang juga disebut dengan istilah peluru.
3. Digunakannya bahan peledak sebagai pelontar proyektil.

Dengan demikian, senjata yang memiliki tekanan udara, senjata tekanan pegas dan senjata tiruan serta bagian-bagiannya yang nyata-nyata dipergunakannya untuk permainan anak-anak adalah bukan senjata api. Meskipun pada dasarnya memiliki kemiripan yang sama dengan senjata api

⁵ Harun, *Modul kuliah Hukum Perizinan*. Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar, Surat Keputusan No.Pol: Skep KApolri No.82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri, hlm 11

⁷ Pasal 1 nomor 1, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

tetapi fungsi dan tata kerjanya memiliki perbedaan. Dan bahkan kini seiring perkembangan teknologi yang sangat maju, senjata tiruan / replika dengan kemiripan yang sama persis dengan aslinya yang diperuntukkan sebagai mainan tersebut dengan nama *Airsoft gun*, banyak sekali dijumpai keberadaannya di tengah-tengah masyarakat khususnya pecinta olahraga ekstrim ini

Termasuk ke dalam jenis-jenis senjata api ini adalah:

1. Laras pendek

a. Pistol

Pistol adalah senjata api yang bisa ditembakkan dengan satu tangan. Kata 'pistol' mulai digunakan untuk mendeskripsikan senjata api genggam pada abad ke-18. Pada abad ke-15 pistol berarti sebuah pisau kecil yang bisa disembunyikan di dalam pakaian. Pistol atau senjata api genggam dibagi menjadi dua jenis utama. Revolver, yang menggunakan kamar peluru yang berputar. Dan pistol biasa, yang kamar pelurunya menyatu dengan laras. Pistol menggunakan kaliber peluru yang bervariasi, dari 22 sampai 50 cal.

b. Revolver

Revolver adalah sejenis senjata api di mana peluru dimasukkan ke tabung berputar. pada revolver berkaliber 44 berisi 5-7 peluru. Adapun revolver berkaliber 22 berisi 8-10 peluru. cara pengisian revolver dibagi menjadi 2 menurut design dan bentuk revolver. yang pertama adalah pengisian satu per satu seperti revolver jenis lama seperti *colt peacekeeper*, dan yang kedua adalah langsung, ketika silinder pengangkut peluru keluar.

c. Derringer

Derringer adalah senjata api pistol yang sangat kecil, berlaras satu atau dua, yang mana pengisian peluru langsung dibelakang larasnya. Karena ukurannya yang sangat kecil, biasanya senjata ini disembunyikan untuk senjata cadangan atau pelengkap.

2. Laras panjang

a. Rifle

Rifle adalah jenis senjata api yang biasanya mempunyai panjang laras lebih dari 18 inci. Terdapat pegangan kearah dada atau

bahu yang disebut stock. Stock difungsikan sebagai penahan dari hentakan yang terjadi ketika menembak sehingga akurasi tetap terjaga.

b. Shotgun

Shotgun adalah senjata api yang biasanya dirancang untuk ditembakkan dari bahu, yang menggunakan energi dari sebuah selongsong (*shell*) berbentuk silinder dan menembakkan sejumlah gentel bulat kecil / gotri (bola timah kecil) (yang dalam bahasa Inggris disebut "shot"), atau sebuah proyektil gotri padat. Senapan patah dapat ditemukan dalam berbagai ukuran, mulai dari diameter lubang laras 5,5 mm (0,22 inci) hingga 5 cm (2 inci), dan dalam berbagai mekanisme operasional senjata api, termasuk *breechloading* (pengisian peluru secara sungsang / dari belakang), laras-tunggal, laras-ganda atau senjata kombinasi, aksi-pompa, aksi-baut, aksi-tuas, semi-otomatis, bahkan varian otomatis penuh. Shotgun umumnya merupakan senjata api *smoothbore* (lubang laras halus), yang berarti bahwa bagian dalam laras tidak mengalami proses rifling (pengaluran spiral di dalam lubang laras).⁸

Dalam mengenal senjata api ada beberapa istilah yang berhubungan dengan pemakaian senjata api sendiri seperti:

1. Amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan.⁹
2. Peluru adalah proyektil padat yang ditembakkan dari senjata api atau senapan angin, yang terbuat dari logam, umumnya dari timbal. Sebuah proyektil peluru merusak target dengan cara menembusnya dengan energi kinetik yang dihasilkan oleh kecepatannya yang sangat tinggi. Dalam konteks modern, sebuah proyektil peluru bersama dengan selongsong, bubuk mesiu, rim dan primer merupakan bagian dari amunisi. Cara kerja saat ditembakkan adalah dengan mendorong proyektil peluru dengan energi kinetik yang dihasilkan ledakan propelan, yang biasanya adalah bubuk mesiu. Bahan peledak ini dinyalakan oleh detonator kecil yang disebut *primer*.¹⁰

⁸ Jenis-Jenis Senjata Api: <http://www.anneahira.com/jenis-jenis-senjata-api.htm>, tanggal 30 November 2011, Pukul 22:00 WIB

⁹ Zaidar Emma, Makalah: *Nitrogliserin Dapat Digunakan Sebagai Peledak*, Universitas Sumatera Utara, 2003, hal 3

¹⁰ Peluru: <http://id.wikipedia.org/wiki/Peluru>, tanggal 30 November 2011, pukul 22:10 WIB

3. Barrel / laras ada 2 macam, yaitu :
 - a. Laras beralur (*spinbore*), dan
 - b. Laras licin (*smoothbore*)
4. Kaliber secara umum menyatakan ukuran peluru yang dipakai pada senjata api. Kaliber dilihat dari diameter atau garis tengah peluru, atau dari diameter isi lorong laras. Kaliber dapat dinyatakan dalam inci maupun dalam milimeter. Biasanya penyebutan dalam inci digunakan untuk produk komersial dan penyebutan dalam milimeter untuk produk militer. Dalam inci, kaliber disebut dalam desimal dan bisa ditambahkan satuan kaliber "*cal*". Jadi untuk peluru dengan diameter 0,45 inci biasa disebut .45 cal (kaliber empat-lima). Dalam milimeter kaliber tidak diberi satuan *cal*, untuk peluru 5,56 milimeter disebut 5.56 mm.¹¹

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api, POLRI merupakan satu-satunya instansi yang berwenang mengeluarkan izin pemakaian senjata api. Berkaitan dengan undang-undang tersebut, maka POLRI mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan senjata api, salah satunya ialah kebijakan yang memperbolehkan masyarakat sipil untuk menguasai senjata api.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolri selaku pimpinan tertinggi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah kebijakan mengenai senjata api yang tertuang dalam Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI melalui SK Kapolri No.Pol.: Skep/28/II/2004. Kebijakan ini merupakan respon dari perundang-undangan terdahulu yang telah mengatur mengenai senjata api. Dalam kebijakan ini

¹¹ Kaliber Peluru: http://id.wikipedia.org/wiki/Kaliber_peluru, tanggal 30 November 2011, pukul 20:15 WIB

terdapat juga pasal yang membolehkan masyarakat sipil untuk dapat menguasai senjata api.

Dikeluarkannya kebijakan mengenai senjata api yang memperbolehkan masyarakat sipil untuk menggunakan senjata api pada dasarnya dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru. Persoalan tersebut ialah pertanyaan mengenai bagaimana sesuatu hal yang tadinya dilarang kemudian dengan berbagai pertimbangan pada akhirnya diperbolehkan namun dibatasi. Pembatasan tersebut berupa harus dipenuhinya syarat-syarat tertentu sebelum memiliki senjata api, dan jenis-jenis senjata api apakah yang boleh dimiliki. Bagi penulis, pembatasan ini menunjukkan hak yang diberikan oleh Polri kepada masyarakat sipil untuk memiliki senjata api tidak secara penuh. Dalam arti lain izin yang diberikan bersifat dispensasi.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.¹² Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa.¹³ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis terbagi dalam unsur-unsur berikut ini:

¹² Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 11

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hal. 43

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji konsep yuridis Polri dalam kapasitasnya sebagai satu-satunya badan yang berwenang memberikan izin kepemilikan senjata api bagi sipil serta penanggulangan penyalahgunaannya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹⁴

Dalam hal berkaitan dengan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapannya tentang norma-norma penegakkan hukum mulai saat proses administrasi perizinan hingga pengawasan senjata api bagi sipil yang telah memperoleh izin, serta alasan-alasan apa hingga masyarakat sipil tersebut mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api.

3. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Polresta Surakarta.

4. Sumber Data

a. Data Primer

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997 Hal 35

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵ Data berupa keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Polresta Surakarta.

b. Data Sekunder

Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder ini dapat berupa:

- 1) Bahan hukum primer yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang Senjata Api
 - c) SK Kapolri No. Pol.: Skep/28/II/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.
 - d) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian yang sedang diteliti.

3) Bahan hukum tersier

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hal.30

Berupa bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari koran, media internet, kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁶

”Wawancara berbentuk sebuah pertanyaan-pertanyaan dengan tema yang diinginkan. Dikerjakan langsung berhadapan dengan yang diwawancara. Teknik wawancara penulisan ini berbentuk wawancara individual. Dalam hal ini yang mewawancarai dan diwawancara langsung berhadapan secara perseorangan dan pewawancara terdiri dari seseorang dan yang diwawancara juga seorang.”¹⁷

Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai salah satu petugas atau lebih anggota Polresta Surakarta yang dalam kapasitasnya berwenang mengeluarkan izin kepemilikan senjata api di Surakarta,

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, hal.83

¹⁷ Komaruddin, 1986, *Metode Penulisan Skripsi*, Bandung: Aksara, hal. 113

dan para pihak (sipil) pemegang izin kepemilikan senjata api sebagai upaya penemuan data primer dari penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data, peneliti akan menggunakan metode analisis kualitatif, yakni suatu analisis yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis.¹⁸ "Teknik analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran, logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis dengan itu."¹⁹

G. Jadwal Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mentargetkan pelaksanaan hingga penyelesaian penelitian ini dengan jangka waktu empat bulan, terhitung sejak awal bulan November 2011 hingga akhir bulan Februari 2012.

No	Unsur Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Kepustakaan	■	■	■													
2	Penulisan Proposal			■	■	■	■										
3	Seminar Proposal					■	■	■									
4	Pengumpulan Data							■	■	■							
5	Organisir Data Lapangan							■	■	■							
6	Analisis Data										■	■	■	■			
7	Penyusunan Laporan Akhir												■	■	■	■	■

¹⁸ Winarno Surakhmad. 1998. *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*. Bandung: Taristo. hal.16

¹⁹ Tatang. M. Amrin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, hal.95

H. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dibagi dalam beberapa Bab, dimana dalam Bab terdiri dari unit-unit Bab demi Bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya, yaitu; Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang; tinjauan umum mekanisme administrasi perizinan senjata api non organik TNI/POLRI, tinjauan umum pengawasan senjata api non organik TNI/POLRI, tinjauan umum tentang alasan masyarakat sipil mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api.

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis data yang akan dibagi menjadi tiga sub-bab, yaitu; bagaimana syarat dan mekanisme administratif kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di kota Surakarta, bagaimana mekanisme pengawasan kepemilikan senjata api bagi sipil oleh Polri dan pihak sipil selaku

pemilik izin senjata api, jawaban atas alasan-alasan pengajuan izin kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil di kota Surakarta.

Bab IV. PENUTUP

Bab ini adalah Bab penutup yang merupakan bab terakhir yang mana akan diberikan kesimpulan dan saran.